RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selama lima tahun ke depan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Renstra ini disusun sebagai upaya meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya dalam pencapaian indikator kinerja.Dan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2025 dan 2029.

Demikian dokumen Renstra ini kami sampaikan semoga dapat diterima, dilaksanakan dan mendapat tanggapan yang positif dari semua pihak

Kuala Tungkal, September 2025

Penanggung Jawab
Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SYAMSUL JUHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN..... 11

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN 31
2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN 42
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN 19
2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS PERHUBUNGAN 27
2.5 POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL 51
2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN 52

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 67

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 75

4.1 KERANGKA RUMUSAN PROGRAM 75
4.2 PROGRAM DAN KEGIATAN 76
4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF 137
URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 190
4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN..... 191

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 194

BAB V PENUTUP 196

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 disusun sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyebutkan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan karena memuat satu kesatuan tentang tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta disusun denganmemperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam Pembangunan Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang perhubungan diharapkan mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu diperlukan untuk

menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang mantap dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya daerah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan regional dan global.

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan khususnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan bidang perhubungan dalam kurun lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (RENSTRA) Tahun 2025-2029 disusun atas dasar

Gambar I.1
Hubungan Renstra OPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Baik Tingkat Pusat Maupun Daerah

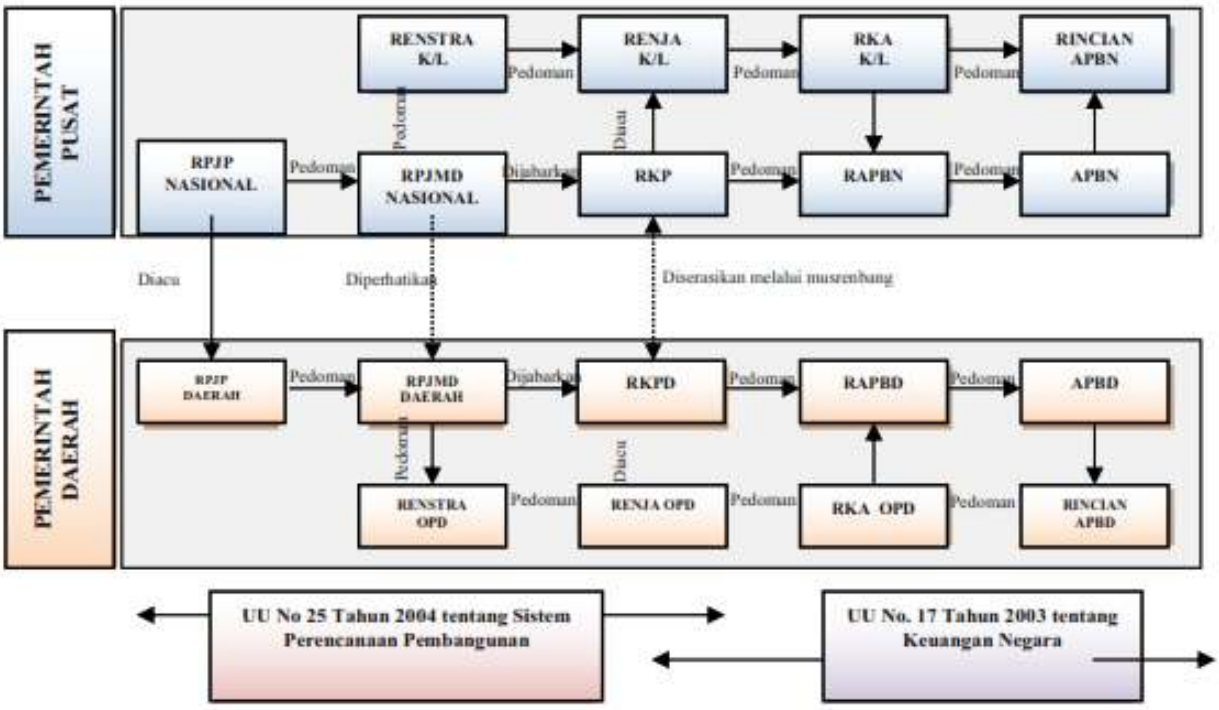

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung BaratTahun 2025 - 2029 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan bidang perhubungan yang terjadi di Kota Batam. Rumusan permasalahan dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Renstra Dinas Perhubungan dan hasil evaluasi pembangunan di bidang

Gambar 1.2

Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPJMD

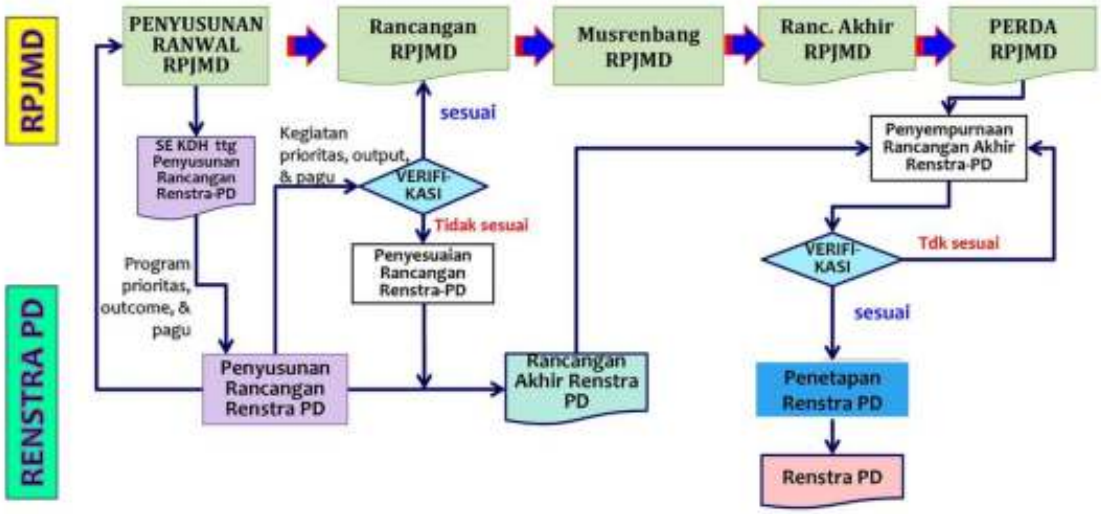

GAMBAR 1.3 Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas

Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

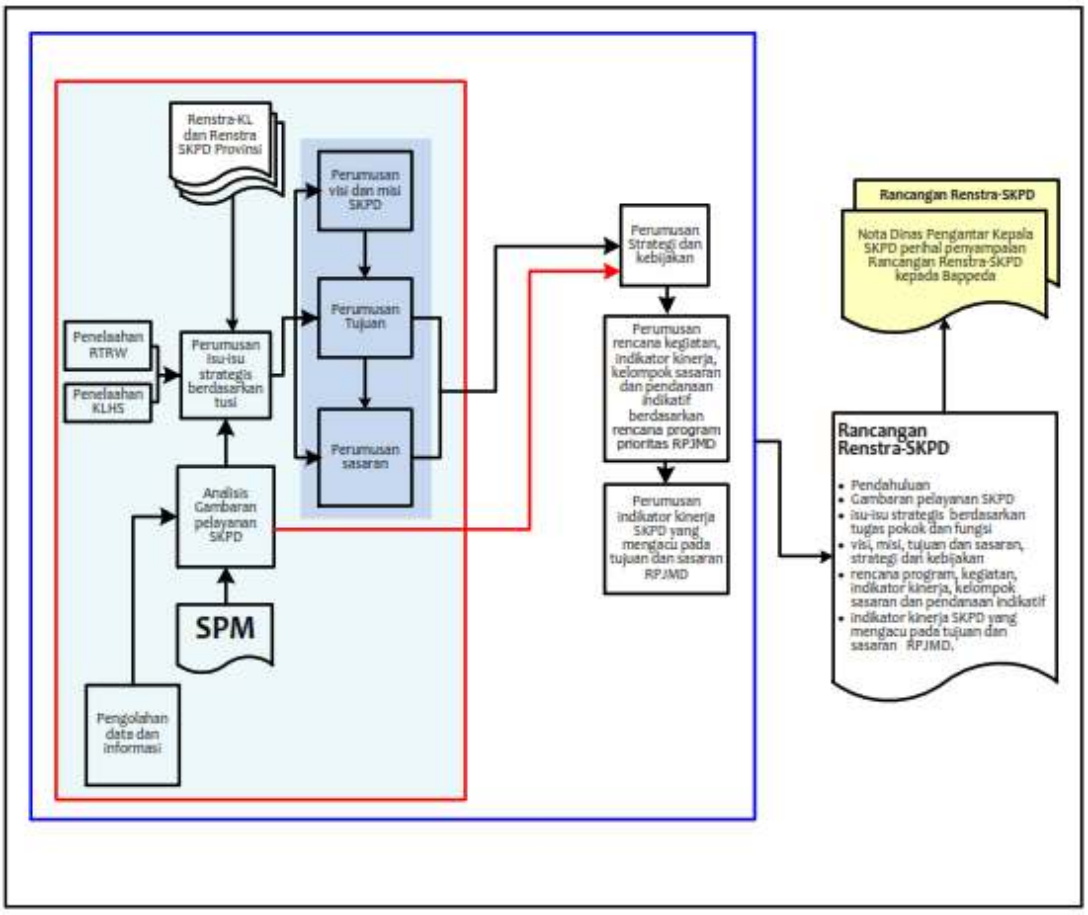

Sebagai salah satu instansi daerah yang bertugas melakukan kegiatan pembangunan dan pengamanan di bidang transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat senantiasa dituntut untuk selalu melakukan perubahan dan mengembangkan langkah-langkah strategis dan realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjuta sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Adanya perubahan dan perkembangan

lingkungan baik pada skala dalam negeri, global yang dinamis maupun tuntutan Reformasi Birokrasi harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan ke depan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun melalui dasar :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional;

b. Udang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

i. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencanan pembangunan jangka pajang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencanan pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

j. Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Kepentingan Sendiri;

k. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

n. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan dan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025-2029 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

b. Tujuan :

1. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu menetapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi – misi Kepala Daerah untuk mewujudkan target yang diingikan priode 5 (lima) tahun mendatang.
3. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal pada tahun 2025 – 2029.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1. Latar belakang

Memuat uraian pendahuluan yang secara rinci menggambarkan kondisi yang mendasari disusunnya Renstra secara umum.

2. Landasan Hukum

Memuat peraturan yang relevan dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang terdiri dari Undang-undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

3. **Maksud dan Tujuan**

   Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu RPJMD, Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, Rencana Kinerja Tahunan dan Strategi Pengelolaan Organisasi dalam pencapaian keberhasilan target pembangunan perhubungan.

4. **Sistematika Penulisan**

   Memuat uraian singkat tentang masing-masing bab dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

1. **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

   Berisikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023.

2. **Sumber Daya Dinas Perhubungan**

   Memuat kondisi ketersediaan sumber daya di Dinas Perhubungan dalam menjalankan dan melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan Perhubungan.

3. **Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**

   Memuat penentuan target Indikator Kinerja Utama dan pencapaian keberhasilan selama 5 (lima) tahun pada Dinas Perhubungan sebagai tolak ukur pencapaian keberhasilan di masa mendatang

4. **Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perhubungan**

   Berisi kelompok sasaran pelayanan Perhubungan pada Dinas Perhubungan.

5. **Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan**

   Menggambarkan kondisi atau realita yang dapat disimpulkan dari kesenjangan realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia dan mengidenfikasi isu strategis sesuai dengan lingkungan dinamis yaitu isu nasional, regional, dan daerah yang dapat mempengaruhi Dinas Perhubungan baik secara langsung ataupun tidak langsung serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.
2. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;
2. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah;
4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan;
5. Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Berisi uraian tentang kesimpulan, kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dinas Perhubungan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS OPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan.

1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri atas
   1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
   2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas:
   1. Seksi Lalu Lintas;
   2. Seksi Angkutan; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Prasarana dan Keselamatan terdiri atas:
   1. Seksi Prasarana;
   2. Seksi Keselamatan; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Unit Pelaksana Teknis.

GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

2. Uraian Tugas

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya tugas pokok dan rincin tugas dari masingmasing jabatan sebagaimana tersebut di atas ditaur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

1) SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas perhubungan. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat memiliki fungsi :

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut LHP;
c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan;
d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan asset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutase, prmosi, kesepakatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi penglolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengeloalaan adan penendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);

e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatusahaan, peraturan perundang – undangan, tata laksana dan hubungan masyarakat;

f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penebitan surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntasi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan Laporan Keuangan

g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan asset;

h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;

i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait sesuai lingkup tugas; dan

j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3) SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

Subbagian Perncanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

program. Dalam melaksanakan tugasnya, subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan program memiliki fungsi :

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
b. Melkaukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi pernyusunan program dan anggaran;
c. Melakukakn penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang – bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU_ dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
g. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesai dengan tugasnya.

4) BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Bidang perhubungan darat memiliki tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, dan rosedur, bimbingan teknis dan supervise, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, system lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan transportasi di bidang perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang perhubungan darat memiliki fugsi :

a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Seksi Lalu Lintas

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang lalu lintas. Seksi Lalu Lintas mempunyai uraian tugas pekerjaan:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;
c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah;
d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah;
f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api dalam Daerah;

g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah;
h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyedian perlengkapan jalan di jalan Daerah;
i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;
k. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

6) Seksi Angkutan

Seksi Angkutan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang angkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Angkutan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah;
d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah;
e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam Daerah;
f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah;
g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;

h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;

i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha angkutanlaut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;

j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah;

k. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan tarif anggkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;

l. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam Daerah;

m. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;

n. kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah
o. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungao dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara atau badan usaha;
p. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkuran penyeberangan sesuai domisili badan usaha;
q. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkerataapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah;
r. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

7) BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN JALAN

Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evalusi dan

pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan tranportasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Prasarana dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan tranportasi;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan tranportasi;
d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan tranportasi; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
f. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan tranportasi;
g. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan tranportasi;

h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan tranportasi; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Seksi Prasarana

Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang prasarana. Dalam melaksanakan nya, Seksi Prasarana mempunyai uraian tugas pekerjaan:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan terminal penumpang tipe C;

c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;

d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;

e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pembangunan pelabuhan untuk berlabuh;
j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengoerasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan penumpan lokal;
k. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;

l. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;

m. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal

n. kebijakan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;

o. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkerataapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah;

p. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api dalam Daerah;

q. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan

r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

9) Seksi Keselamatan

Seksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang keselamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Keselamatan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

a. Amelakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan Daerah;
c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Daerah;
e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; keselamatan pengusahaan angkutan umum;

f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi kelaikan kendaraan;
g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
h. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ asset

1. Kondisi Infrastruktur Dinas Perhubungan

Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berdaya saing diperlukan peningkatan infrastruktur perhubungan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan

transportasi, utamanya Konektivitas Dari Desa Ke Kota, Keselamatan Perjalanan Transportasi dan Kualitas Layanan Angkutan Umum.

2. Infrastruktur Pendukung Konektivitas Transportasi

a. Angkutan Jalan

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan Jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya angkutan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten dalam 1 (satu daerah Provinsi).

Angkutan pedesaan adalah angkutan pada jaringan trayek pedesaan yang melayani suatu kawasan pedesaan dan tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan. Dalam Hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kewenangan terhadap jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu daerah Provinsi, adapun trayek Angkutan pedesaan di Provinsi.

Tabel 2.1

Kebutuhan Trayek Angkutan Pedesaan Yang Melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu daerah Provinsi

NO	NAMA LOKET	TRAYEK	JUMLAH KENDARAAN
1	2		3
1	Terminal Kota	- Kuala Tungkal - Desa Pembengis - Sei Saren - Kuala Tungkal - Desa Serdang Jaya - Desa Pematang Lumut - Batas Kab. Tanjab Barat - Kuala Tungkal -Simpang T Desa Parit Pudin - Teluk Nilau - Kuala Tungkal -Desa Purwodadi - Tebing Tinggi - Kuala Tungkal -Kuala Dasa - Pel. Dagang - Batang Asam - Kuala Tungkal -Merlung - Lubuk Kambing - Kuala Tungkal -Merlung - Senyerang - Teluk Ketapang	25
2	PO. PIPPOS	- Kuala Tungkal - Jambi - Kuala Tungkal - Jambi - Kuala Tungkal - Linggau - Kuala Tungkal -Pekan Baru - Kuala Tungkal - Palembang	15
3	PO. RATU INTAN	- Kuala Tungkal - Curup - Kuala Tungkal - Lampung - Kuala Tungkal - Tembilahan - Kuala Tungkal - Padang - Kuala Tungkal - Bengkulu	20
4	PT. KERINCI WISATA EXPRES	- Kuala Tungkal-Rengat-Bengkalis - Kuala Tungkal - Jambi - Kuala Tungkal - Sarolangun - Kuala Tungkal - Muaro Bungo - Kuala Tungkal - Bangko	37

5	PO. ABC	- Kuala Tungkal - Sungai Penuh - Kerinci - Kuala Tungkal - Jambi - Kuala Tungkal - Tembilahan - Kuala Tungkal - Pekan Baru - Kuala Tungkal - Linggau - Kuala Tungkal - Dumai - Kuala Tungkal Pangkalan Kermei - Kuala Tungkal - Kampar - Kuala Tungkal-Duri - Kuala Tungkal-Siak - Kuala Tungkal - Jambi - Kuala Tungkal - Palembang - Kuala Tungkal - Lampung - Kuala Tungkal - Jakarta - Kuala Tungkal - Sarolangun - Kuala Tungkal - Bangko - Kuala Tungkal - Muaro Bungo	35
6	PO. SUMBA PUTRA MANDIRI	- Kuala Tungkal - Padang - Kuala Tungkal - Jawa Barat Kuala Tungkal - Jawa Timur - Kuala Tungkal - Jawa Tengah - Kuala Tungkal-Surabaya - Kuala Tungkal-Bandung - Kuala Tungkal - Yogyakarta - Kuala Tungkal - Musi Banyuasin - Kuala Tungkal - Lahat - Kuala Tungkal - Bayung Lincir - Kuala Tungkal - Jambi - Kuala Tungkal - Palembang - Kuala Tungkal - Bandar Lampung - Kuala Tungkal - Jakarta	37
7	PO. GADING INDAH	- Kuala Tungkal - Jawa Barat - Kuala Tungkal - Jawa Timur - Kuala Tungkal - Jawa Tengah Kuala Tungkal - Pagar Alam	40
8	PO. MARINA EXPRES	- Kuala Tungkal - Jambi	20

9	CV. PUMAVIA WISATA	- Kuala Tungkal - Jambi - Kuala Tungkal - Palembang - Kuala Tungkal - Lampung - Kuala Tungkal - Jakarta - Pulau Jawa - Kuala Tungkal - Tembesi - Kuala Tungkal - Muaro Tebo - Kuala Tungkal - Muaro Bungo - Kuala Tungkal - Padang - Kuala Tungkal - Pauh - Mandiangin - Kuala Tungkal - Sarolangun - Kuala Tungkal - Bangko - Kuala Tungkal - Linggau - Kuala Tungkal - Bengkulu - Kuala Tungkal - Bukit Tinggi - Kuala Tungkal - Solok - Kuala Tungkal -Tulang Bawang	31
10	PO. SYUKUR BERSAMA	- Kuala Tungkal - Jambi - Kuala Tungkal - Palembang - Kuala Tungkal - Tanjung Enim - Kuala Tungkal - Prabumulia - Kuala Tungkal - Batu Rajo - Kuala Tungkal - Martapura - Kuala Tungkal - Lampung - Kuala Tungkal - Jakarta - Kuala Tungkal - Jawa Tengh - Kuala Tungkal - Jawa Timur - Kuala Tungkal - Jawa Barat - Kuala Tungkal - Tebing Tinggi - Kuala Tungkal - Sarolangun - Kuala Tungkal - Bangko - Kuala Tungkal - Bungo - Kuala Tungkal - Singkut - Kuala Tungkal - Tebo - Kuala Tungkal - Kerinci - Kuala Tungkal - Padang - Kuala Tungkal - Sabak - Kuala Tungkal - Nipah Panjang - Kuala Tungkal - Tembilahan - Kuala Tungkal - Kayu Agung - Kuala Tungkal - Pekan Baru	30

		- Kuala Tungkal - Rupit	
		- Kuala Tungkal - Linggau	
		- Kuala Tungkal - Curup	
		- Kuala Tungkal - Bengkulu	
		- Kuala Tungkal - Medan	
11	PO. TANTAN MANDIRI BARU	- Kuala Tungkal - Jambi - Kuala Tungkal - Palembang - Kuala Tungkal - Prabu Mulih - Kuala Tungkal - Muara Enim - Kuala Tungkal - Batu Rajo - Kuala Tungkal - Tebing Tinggi - Kuala Tungkal - Marta Pura - Kuala Tungkal - Lampung - Kuala Tungkal - Jakarta - Kuala Tungkal - Pulau Jawa - Kuala Tungkal - Tebing (WKS) - Kuala Tungkal - Sarolangun - Kuala Tungkal - Bangko - Kuala Tungkal - Bungo - Kuala Tungkal - Singkut - Kuala Tungkal - Tebo - Kuala Tungkal - Kerinci - Kuala Tungkal - Padang - Kuala Tungkal - Sabak - Kuala Tungkal - Pekan Baru - Kuala Tungkal - Tembilahan - Kuala Tungkal - Dumai - Kuala Tungkal - Linggau - Kuala Tungkal - Curup - Kuala Tungkal - Bengkulu - Kuala Tungkal - Medan - Kuala Tungkal - Padang Sidempuan - Kuala Tungkal - Sibolga - Kuala Tungkal - Kisaran - Kuala Tungkal - Pematang Siantar	34
JUMLAH		65	324

b. Terminal Type C

Sesuai dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 964 / Kep.Bup / DISHUB / 2018 tentang Lokasi Terminal Penumpang Type C. Adapun berikut persebaran Terminal Penumpang Type C :

Tabel 2. 2

Daftar Terminal Type C yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	NAMA TERMINAL	LOKASI		JUMLAH
1	2			3
1	Terminal Tipe C	-	Kecamatan Tungkal Ilir	1
		-	Kecamatan Seberang Kota	0
			Kecamtan Bram Itam	1
		-	Kecamatan Betara	1
		-	Kecamatan Tungkal Ulu	1
		-	Kecamtan Tebing Tinggi	1
		-	Kecamatan Merlung	1
		-	Kecamatan Senyerang	1
			Kecamatan Muara Papalik	1
		-	Kecamtan Batang Asam	1
			Kecamatan Kuala Betara	0
		-	Kecamatan Pengabuan	1
		-	Kecamatan Ranah Mendaluh	1
Jumlah				11

c. Infrastruktur Pendukung Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP

Dalam mendukung peningkatan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat prasarana pendukung konektivitas transportasi laut dan ASDP diantara nya :

1. Pelabuhan RORO Kuala Tungkal

a. Letak Geografis

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak antara 0o53’ – 01o41’ Lintang Selatan dan antara 103o 23’ - 104o21’ Bujur Timur. Luas wilayah KabupatenTanjung Jabung Barat adalah 5.009,82 Km2. Batas-batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat: Utara : Propinsi Riau Selatan : Kabupaten Batanghari Barat : Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo, Timur : Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelabuhan Roro Kuala Tungkal terletak di Desa Tungkal I Parit Tujuh, berjarak 5 Km dari pusat Kota. Pelabuhan yang dibangun dengan kapasitas sandar 5000 dwt ini, memiliki luas area daratan 353,5 x 200 m2, lapangan penumpukan 18.236 m2, gudang 60 x 20 m2, dan kantor seluas 15,5 x 25 m2. Sedangkan sisi lautnya memiliki dermaga seluas 200 x 20 m2, kedalaman -8 Mlws, Trestle 206 x 8 m2, dan Causeway 150 x 8 m2.

b. Data Jumlah Produksi Pelabuhan RoRo Kuala Tungkal

2. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas PNS, TKS dan TKK yang terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) PNS dan 90 (Sembilan Puluh) TKK.

Jika ditinjau dari kepegawaian dan tingkat tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3

SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
1	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon :			
	- Eselon II	1	1	-
	- Eselon III	3	3	-
	- Eselon IV	11	10	1
	-Non Eselon	16	13	3
	Jumlah	**31**	**7**	**4**
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :			
		1	1	0

	- SD - SMP - SMA - D II - D III - D IV - S.1 - S.2 **Jumlah**	1 12 1 2 0 12 2 **31**	1 11 1 1 0 10 2 **27**	0 1 0 1 0 2 0 **4**
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Status : - PNS - Kontrak	31 90	27 81	4 9
4	Pendidikan Perjenjangan Aparatur : - Diklat PIM II - Diklat PIM III - Diklat PIM IV	0 1 3	0 1 3	0 0 0

3. Sumber Daya Lainnya

Sumber Daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Adapun asset yang mendukung

kegiatan pelayanan dan operasional pada yang ada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut

Tabel 2.4

Aset Pendukung Kegiatan Pelayanan Dan Operasional

Pada Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Jenis Asset	Jumlah	Ket
1.	Prasarana		
	a. Gedung kantor Dishub	1 unit	
	b. Gedung hanggar bongkar muat barang	1 unit 1 unit	
	c. Terminal Kota	2 unit	
	d. Gedung UPT Sarana dan Prasarana	1 unit	
	e. Gedung Pos pengujian kendaraan bermotor	1 unit	
	f. Pos pengawasan di dermaga	1 unit	
	- Dermaga LLASDP	1 unit	
	- Dermaga tangga raja ulu	1 unit	
	- Dermaga ampera	1 unit	
	- Dermaga kuatik	18 unit	
	g. Halte sungai		
2.	Sarana	1 unit	
	a. Kendaraan operasional kepala dinas	2 unit	
	b. Kendaraan operasional LLAJ	3 unit	
	c. Kendaraan operasional bus sekolah	21 unit	
	f. Kendaraan operasional dinas roda dua	1 unit	
	g. Kendaraan operasional roda tiga	1 unit	
	g. Kendaraan operasional air (speedboat)		
3.	Fasilitas Keselamatan Transportasi		
	a. Rambu darat	433 unit	
	b. Rambu type F	8 unit	
	c. Rambu Mini	15 unit	

	d. RPJJ (Rambu petunjuk jalan darat) e. Pagar temporer f. Warning light h. Traffic light i. Guadrail j. Median k.Rambu sungai	17 unit 39 unit 12 unit 2 unit 1 paket 1 paket 30 nit	

2.3 KINERJA PELAYANAN

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten tanjung Jabung Barat dimana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelayanan transportasi diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, utamanya dalam mewujudkan pemerataan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan tertib kepada masyarakat dalam mendukung produktivitas daerah.

Dalam periode pembangunan lima tahun sebelumnya, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mencapai target layanan yang direncanakan, beberapa diantaranya justru melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih ada beberapa target pelayanan yang belum dapat dipenuhi dengan tuntas, dikarena beberapa kendala yang dialami, baik kendala yang berkaitan dengan keterbatasan SDM, sarana pendukung kerja, maupun kendala yang berasal dari pihak luar, termasuk dari masyarakat.

Rekapitulasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel

Laporan Realisasi Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024 sebagai berikut (**Tabel 2.3)** :

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

a. Capaian Kinerja RPJMD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ASPEK PELAYANAN UMUM

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) (Indikator sesuaikan dengan RPJMD)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																					SKPD Penanggung Jawab	hanya indikator PMDN 52 yang terpenuhi		Seluruh indikator PMDN 52	
			2021			2022			2023			2024			2025			2026			Kondisi Pada Akhir Periode RPJMD							
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%		Penilaian tanpa batasan skor	Penilaian dengan range skor 0-100%	Penilaian tanpa batasan skor	Penilaian dengan range skor 0-100%
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	16	17	18	19	20	21	22				
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																											
	i Perhubungan				0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%		103,97%	87,56%	103,97%	87,56%
1	Jumlah arus penumpang angkutan	Orang	252000	271955	108%	262000	290098	111%	272000	289813	107%	282000	275151	98%	292000	0	0%	1360000	1127017	83%	1360000	1127017	82,87%	Dinas Perhubungan	105,69%	100,00%	105,69%	100,00%
2	jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	980	0	0%	1180	0	0%	1210	1755	145%	1300	2793	215%	1350	0	0%	6020	4548	76%	6020	4548	75,55%	Dinas Perhubungan	179,94%	100,00%	179,94%	100,00%
3	Jumlah pelabuhan /Halte Sungai /Terminal	Unit	2	0	0%	2	2	100%	2	2	100%	2	4	200%	2	2	100%	10	11	110%	10	11	110,00%	Dinas Perhubungan	125,00%	100,00%	125,00%	100,00%
4	persentase kepemilikan KIR	%	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%	100,00%	37,00%	37%	100,00%	63,00%	63%	100,00%	0,00%	0%	500,00%	100,00%	20%	500,00%	100,00%	20,00%	Dinas Perhubungan	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
5	pemasangan rambu rambu	Unit	30	10	33%	35	8	23%	40	20	50%	45	31	69%	45	0	0%	195	69	35%	195	69	35,38%	Dinas Perhubungan	43,77%	43,77%	43,77%	43,77%
6	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,080	0,083	104%	0,081	0,075	93%	0,082	0,071	87%	0,083	0	0%	0,084	0	0%	0,41	0,229	56%	0	0	55,85%	Dinas Perhubungan	94,31%	94,31%	94,31%	94,31%
7	jumlah orang/barang yang tersangkut angkutan umum	Orang	192000	192300	100%	193000	291098	151%	194000	215696	111%	195000	153957	79%	195000	0	0%	969000	853051	88%	969000	853051	88,03%	Dinas Perhubungan	110,28%	100,00%	110,28%	100,00%
		Barang	6100	6158	101%	6200	2544	41%	6300	9324	148%	6400	12422	194%	6500	0	0%	31500	30448	97%	31500	30448	96,66%	Dinas Perhubungan	121,02%	100,00%	121,02%	100,00%
8	jumlah orang melalui dermaga/bandara/ terminal pertahun	Orang	252000	271955	108%	262000	290098	111%	272000	289813	107%	282000	275151	98%	292000	0	0%	1360000	1127017	83%	1360000	1127017	82,87%	Dinas Perhubungan	105,69%	100,00%	105,69%	100,00%
		Barang	30000	25638	85%	35000	117972	337%	40000	42343	106%	45000	37260	83%	50.000	0	0%	200000	223213	112%	200000	223213	111,61%	Dinas Perhubungan	152,80%	100,00%	152,80%	100,00%

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja RPJM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari rata – rata capaian 8 (Delapan) indikator kinerja sasaran tersebut dapat dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan. Persentase rata- rata capaian mencapai angka 72% sampai dengan tahun 2024.

Indikator Yang realisasinya dibawah 50% adalah :

a. Pemasangan Rambu Rambu Darat Target sampai dengan tahun Akhir Priode 2025 adalah 195 unit **Realisai 69 unit** (35%) Sampai dengan tahun 2024. Tahun 2025 Dinas Perhubungan telah menganggarkan sebanyak **95 unit.**
   Dapat disimpulkan hingga sampai akhir priode Tahun 2025 **realisasi indikator tersebut mecapai 159 Unit (81%).**

b. Capaian Kinerja Keuangan dan PAD Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024

Tabel 2.6

REALISASI ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TAJUNG JABUNG BARAT

NO	TAHUN	DPA		REALISASI DPA		Rasio Capaian Tahun ke -	
		LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	Langsung	Tidak Langsung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021	2.032.500.000	6.017.145.280	2.023.340.990	5.815.519.214	99,55%	96,65%
2	2022	1.428.430.145	6.928.565.966	1.415.272.916	6.606.628.508	99,08%	95,35%
3	2023	1.548.142.000	6.742.058.212	1.531.235.648	6.403.202.306	98,91%	94,97%
4	2024	3.957.786.296	9.145.432.021	3.879.736.481	8.846.973.038	98,03%	96,74%

Data Grafik Rasio Capaian Belanja OPD

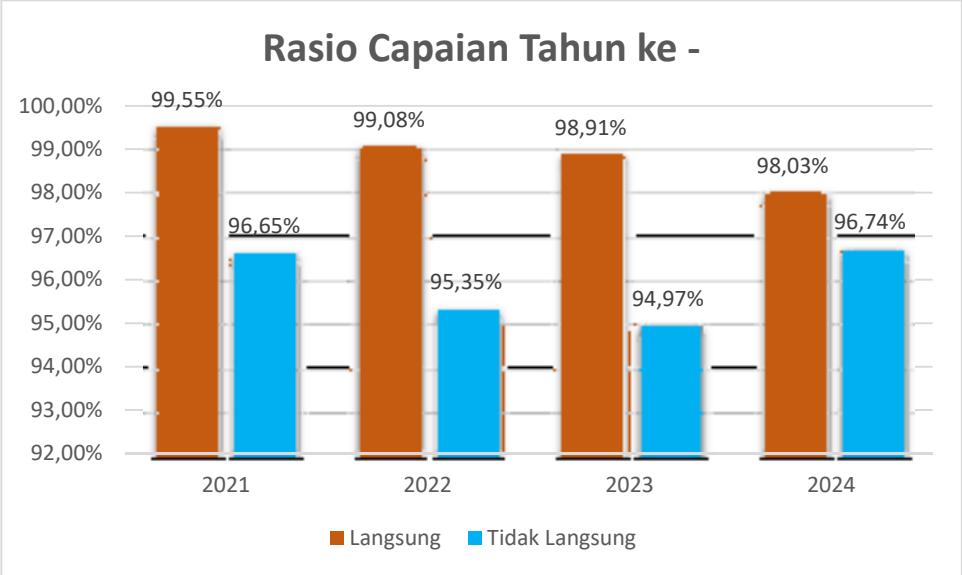

Realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan meliputi penerimaan pendapatan asli daerah dan belanja daerah. Secara umum pencapaian target Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung dari tahun ke tahun realisasi relatif mempunyai nilai yang baik sesuai target yang telah ditetapkan. Namun demikian rata-rata pertumbuhan anggaran terhadap realisasi mengalami penurunan Penilai tertinggi kinerja berada di tahun 2023, dimana pada tahun tersebut diindikasikan dalam perolehan Persentase Belanja Langsung 98,91% dan Belanja Tak Langsung 94,97%. Akan tetapi pada sektor belanja langsung rasio dari tahun ke tahun relatif baik berada di atas 94%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai perencanaan.

Selanjutnya dalam capaian kinerja anggaran dinas perhubungan juga terdapat realisasi Pendapatan Asli Daerah melalui sektor perhubugan, dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 2.6 Realisasi PAD

PENCAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BIDANG PERHUBUNGAN				
NO	TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD	RASIO Capaian Tahun ke-
1	2	3	4	5
1	2021	649.000.000	468.024.200	72,1%
2	2022	390.000.000	596.677.200	153,0%
3	2023	605.000.000	801.603.200	132,5%
4	2024	520.000.000	686.527.000	132,0%

Data Grafik Realsasi PAD

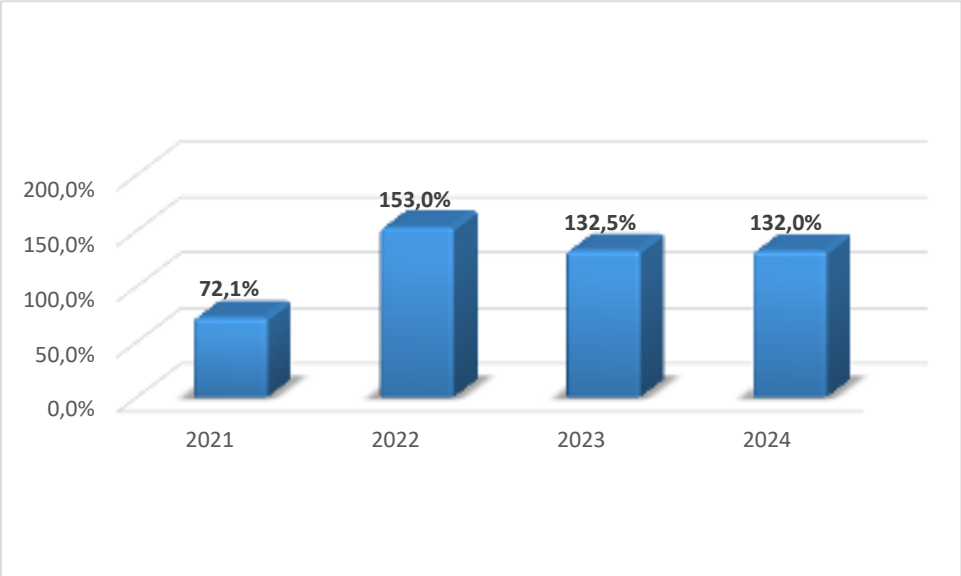

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu perangkat daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum
    - Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum
    - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Retribusi Jasa Usaha
    - Retribusi Terminal
    - Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Secara umum pencapaian target PAD dari tahun ke tahun realisasi relatif mempunyai nilai yang baik sesuai target yang telah ditetapkan. Namun demikian rata-rata pertumbuhan PAD terhadap realisasi mengalami penurunan Penilai tertinggi berada di tahun 2021 yaitu dengan Target PAD Rp. 649.000.000 dan Realisasi Rp. 468.024.200 dengan persentase **72,1%.** Diketahui bahwa realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2021 adalah 0% sehingga menyebabkan target PAD tidak tercapai, Target yang ditentukan adalah Rp. 150.000.000,- dan realisasi Rp.0,- dengan persentase 0%. Hal ini disebabkan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor tidak mendapatkan izin operasional dari Kementerian Perhubungan RI sehingga tidak dapat menarik retribusi daerah dikarenakan belum mendapatkan minimal Akreditasi B.

Selanjutnya hal tersebut juga berdampak terhadap penetapan target PAD tahun 2022 terjadi penurunan target yang signifikan Rp.

150.000.000,- Sehingg target PAD Dinas Perhubungan turun menjadi Rp. 390.000.000,- yang semula Rp. 649.000.000 Pada tahun 2021.

c. Pengukuran Kinerja Melalui Indikator Kinerja Utama OPD

Pengukuran kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah proses menilai dan mengukur keberhasilan suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, dengan menggunakan serangkaian indikator yang telah ditetapkan. IKU membantu organisasi untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memastikan bahwa upaya yang dilakukan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikut kami lampirkan data realisasi capaian indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024:

a. Tabel 2.7 Capaian IKU Tahun 2020

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Target 2020		
				Target	Realisasi	Capaian %
				6	7	8
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan	Persentase Peningkatan Retribusi pada Terminal Pembengis	Jumlah Realisasi Retribusi x 100% / Target Retribusi	Rp48.000.000	Rp63.356.000	131,99%
		Persentase Peningkatan Retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Realisasi Retribusi x 100% / Target Retribusi	Rp30.000.000	Rp27.816.000	92,72%
		Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Kepelabuhan	Jumlah Realisasi Retribusi x 100% / Target Retribusi	Rp120.000.000	Rp257.594.800	214,66%
2	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Air	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	Total Kasus Kecelakaan Darat Tahun Berjalan	20 Kasus	50 Kasus	40,00%
		Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	Total Kasus Kecelakaan Darat Tahun Berjalan	3 Kasus	2 Kasus	66,67%
3	Meningkat nya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	Jumlah Kendaraan Yang Sudah Diuji x 100% / Jumlah Kendaraan yang wajib uji	1210 Unit	251 Unit	20,70%

Capaian hasil kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Telah memenuhi target capaian misi 1 kepala daerah tahun 2020. Dalam mendukung sasaran 1.1 yaitu Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan Dinas Perhubungan telah mengusulkan dan mendapatkan bantuan dana APBN Kementrian Perhubungan RI untuk pembngunan halte sungai pada Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pembangunan halte sungai tentunya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Perhubungan Melalui Pembangunan Infrastruktu Dasar Halte Sungai dan Meningkat kan mobilitas serta ekonomi masyarakat dari Desa ke kota.

Uraian Pembangunan halte sungai tahun 2020, sebagai Berikut :

1. Pembangunan Halte Sungai Desa Sungai Raya Kecamatan Pengabuan
2. Pembangunan Halte Sungai Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan
3. Pembangunan Halte Sungai Kelurahan Betara Kiri kecamatan Kuala Betara

Terdapat dua indikator kinerja utama yang realisasi nya dibawah 50% yaitu :

a. Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat

Indikator sasaran ini bertujuan untuk upaya pemenuhan sarana keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pemakai jalan.

Pada indicator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2020 mencapai angka 40% atau realisasi 50 Kasus dengan target 20 kasus. pada tahun 2021 pencapaian target terbilang **Kurang Baik** karena semakin tinggi angka kecelakaan lalu lintas bertolak belakang dengan tolak ukur sasaran strategis Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat.

Permasalahan dan Solusi

❖ **Permasalahan :**

- Masih minimnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan seperti marka, rambu lalu linta, halte, traffic light dan lainnya merupakan sarana prasarana perhubungan yang mendukung pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi. Sarana dan prasarana tentunya menjadi instrument penting menuju keselamatan lalu lintas.
- Kurangnya partisipasi warga kabupaten untuk memahami dan mematuhi aturan lalu lintas.

❖ **Solusi**

- Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan
- Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus
- Penagakan hokum dan melakukan operasi tertib lalu lintas
- Memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas

b. Persentase Kendaraan Yang Laik Jalan

Indikator sasaran ini bertujuan sebagai upaya memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan

kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. Dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Serta untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat.

Pada indikator ini pencapaian kinerja di tahun 2020 mencapai predikat **sangat tidak baik.** Jumlah kendaraan yang memenuhi standar laik uji adalah 251 unit dengan target di tahun 2020 adalah 1210 unit dengan realisasi capaian (**20,7%).** Terhitung pada bulan februari tahun 2020 Kegiatan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor ditutup karena kekurangan salah satu alat uji yaitu **Brake Tester**, sehingga menjadi tidak memenuhi standar akreditasi laik operasional pengujian kendaraan bermotor.

Permasalahan dan Solusi

❖ **Permasalah :**

- Pada bulan februari tahun 2020 gedung Pengujian Kendaraan Bermotor resmi di tutup dikarenakan tidak dapat memenuhi Standar Akreditasi sehingga tidak mendapatkan izin legalitas operasional sehingga tidak dapat memenuhi target capaian. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menganggarkan pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor melalui APBD Perubahan Tahun 2021.
- Kekurangan alokasi anggaran.
- Masih kurangnya fasilitas perhubungan yaitu alat uji pengujian kendaraan bermotor yang merupakan kunci utama untuk memberikan pelayana prima dan sesuai standar.

❖ **Solusi**

- Segera melakukan penyesuaian akreditasi pada UPKB agar dapat beroperasional.
- Penegakan hukum dan melaksanakan operasi razia rutin bekerja sama dengan satlantas dan PM untuk menertibkan kendaraan yang tidak memiliki izin laik jalan.
- Menjalin korelasi dengan pihak ketiga sebagai pengguna jasa transportasi untuk melakukan uji laik kendaraan secara berkala. Tentunya hal ini juga akan berpengaruh baik untuk peningkatan PAD pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus. Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya uji laik kendaraan secara berkala.

d. Analisis SWOT Terhadap Pengembangan Pelayanan OPD

a. STRENGTHS (KEKUATAN):

1. Komitmen dan kompetensi sumber daya manusia di beberapa bagian/unit.
2. Sarana dan prasarana yang relatif memadai.
3. Regulasi yang mendukung.

b. WEAKNESSES (KELEMAHAN):

1. Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalulintas;
2. Belum seimbangnya kapasitas jalan dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun;

3. Fasilitas parkir yang masih menggunakan badan jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan dan menyebabkan kemacetan;
4. Trotoar jalan masih digunakan oleh pedagang kaki lima sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas ;
5. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas;
6. Sarana dan prasarana perhubungan belum optimal;
7. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih;
8. Sarana dan prasarana angkutan barang yang belum memadai;
9. Masih kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka da guardrail) dan penerangan jalan Kabupaten;
10. Kompetensi SDM secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, khususnya di bidang non teknis;

c. OPPORTUNITIES (PELUANG) :

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten sehingga memberi Harapan masyarakat terhadap peningkatan Pelayanan Publik Dishub;

2. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dalam bertransportasi.
3. Rencana pembangunan infra struktur diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Adanya regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub.
5. Semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui media massa cetak dan elektronik sehingga masyarakat/stakeholder dapat memberikan aspirasi yang positif untuk Dishub.

d. THREATS (ANCAMAN):

1. Adanya kepentingan pihak tertentu yang tidak mendukung upaya peningkatan kualitas perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Keterbatasan lahan jalan di Kabupatenn Tanjung Jabung Barat karena makin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit;
3. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dan tidak dapat dibendung penambahan unit kendaraan pribadi

2.4 KELOMPOK SASARAN

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Masyarakat pengguna jalan dan pengguna kendaraan bermotor ;
2. Pemilik kendaraan umum angkutan orang dan kendaraan barang ;
3. Pemilik angkutan orang dan/atau barang di perairan;
4. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

3 MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN

1. **Polres Tanjab Barat**

   Menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **KODIM 0419 TANJAB**

   Menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan dan ancaman, baik itu yang datang dari luar maupun dari dalam.

3. **MAKO TNI AL**

   Anggota Lanal mengedepankan kearifan lokal dan bernilai ibadah dalam menjalankan tugas, selanjutnya pelaksanaan tugas itu memberi kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu harus dapat memantapkan koordinasi dengan instansi terkait.

4. **PT. ASDP**

   Menyediakan layanan transportasi laut menggunakan kapal ferry untuk menghubungkan antar pulau, baik yang bersebelahan maupun yang lebih jauh. Melakukan 2 rute pelayanan yaitu Kuala Tungkal – Batam dan Kuala Tungkal Dabo

5. **DAMRI**

   DAMRI adalah pilar transportasi darat yang menyediakan layanan angkutan massal untuk masyarakat. Untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Damri menyediakan mobil ankutan untuk rute Kuala Tungkal – Teluk Nilau – Senyerang.

6. **PENGELOLA PARKIR**

   Melakukan Pelayanan FasilitasParkir Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat.

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis OPD

a. INDETIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya dijaman modern ini sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya, dan itu sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan ekonomi, pengetahuan dan informasi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya (Self Evaluation). Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat maupun dari

kewenangan yang ada di luar Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Aspek yang menjadi bahan kajian untuk melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi meliputi permasalahan kesekretariatan dan permasalahan yang ada di bidang atau yang menjadi urusan wajib perhubungan.

Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Aksebilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut		
		Masih Kurangnya Konektivitas Angkutan	
			Belum ada Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/kota
			Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Belum Menyeluruh
			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Belum Menyeluruh
			Pembangunan Dermaga Sungai/Halte Sungai dan Danau Belum Menyeluruh

		Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/ Terminal Pertahun yang meningkat	
			Masih kurangnya pemenuhan Angkutan Orang Dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota
			Pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi belum optimal.
		Belum optimalnya Pemanfaatan Terminal	
			Pembangunan Terminal Terpadu Pada Kawasan Pelabuhan
			Masih diperlukan Pengembangan sarana dan prasarana termina
		Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	
			Masih kurangnya implementasi dokumen RIJLLAJ
			Masih diperlukannya pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota
			Perlu menyusun Rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

			Perlu menyusun Rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau
	Belum optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut		
		Masih rendahnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	
			Perlu pemasangan prasarana jalan kab/kota pada titik rawan kecelakaan
			Perlu melakukan pemeliharaan perlengkapan jalan
		Masih kurangnya Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	
			Perlunya menyediakan sarana dan prasarana Gedung PKB
			Masih kurangnya Jumlah Kendaraa bermoto wajib uji yang lulus uji berkala di Kab/kota
			Perlu dilakukan identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji
		Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan	

		Laut yang melebihi target	
			Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas belum optimal
			Perlunya rekomendasi hasil Forum LLAJ
			Perlunya rekomendasi/persetujuan Andalalin di Jalan Kab/kota
			Masih perlunya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
			Masih rendahnya kompetensi pengemudi kendaraan bermotor
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perhubunganyang belum memenuhi standar	
			Masih diperlukan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah
			Masih diperlukan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah
			Masih diperlukan pelaksanaan

			administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
			Masih diperlukan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah
			Masih diperlukan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
			Masih diperlukan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
			Masih diperlukan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
		Belum optimalnya pemenuhan Nilai SAKIP OPD sesuai target	
			Masih diperlukan Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah

b. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI (PM)

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode 2025 – 2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025 – 2045 dan berdasarkan masalah – masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam

masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai misi yang diemban, diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025 – 2029 :

VISI ;

"Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI"

BERKAH ;

(*Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis)*

MADANI ;

(Mandiri dan ber-Inovasi)

MISI ;

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik;
3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendukung pemenuhan visi & misi 3 Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut **"Terwujudnya Kualitas Pelayanan dan Konektivitas Transportasi Dari Desa Ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi"** mendukung pada pemenuhan Misi 2 dan **"Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"** mendukung pada pemenuhan Misi 2.

Keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menunjang misi tersebut sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman dan aman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maju secara teknologi, hijau dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan untuk terciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan secara merata dan berkelanjutan.

Faktor – faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya :

1. Tingkat Kebutuhan volume anggaran yang besar untuk penyediaan salah satu prasarana laut seperti halte sungai sebagai penghubungan konektivitas orang dan barang dari Desa Ke Kota
2. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
3. Survey kapasita ruas jalan yang menunjukkan masih banyak Bahu jalan, tipe jalan dan hambatan samping tidak sesuai standar karena masih banyak pemukiman warga dan pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan

4. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas sehingga sebagian besar kecelakaan terjadi karena faktor kelalaian pengemudi.
5. Masih adanya akasi – aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagiankecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu – rambu lalu lintas sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan di jalan.

Adapun faktor – faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Adanya diklat, bimtek peningkatan kapasitas SDM aparatur perhubungan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, sehingga menjadikan sebuah harapan untuk peningkatan kompetensi SDMperhubungan.
2. Adanya dorongan dari pemerintah pusat dan propinsi serta keikutsertaan /lembaga/instansi non pemerintah yang berpartisipasi dan turut serta dalam pemenuhan prasarana kelengkapan angkutan darat dan laut, yang sangat membantu dalam upaya meningkatkan konektivitas orang/barang dan keselamatan berlalu lintas di jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Akan disusun rencana kegiatan penyusunan dokumen rencana induk LLAJ dan survey keselamatan jalan untuk menciptakan tata kelola transportasi yang bersih aman dan selamat.

c. TELAAHAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L) DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

i. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 adalah "Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah." Sedangkan misi :

1. Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional;
2. Peningkatan penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan;
3. Peningkatan professionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

d. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

Visi yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 adalah : "Terwujudnya Jambi Tuntas 2021 melalui penyelenggaraan sistem transportasi yang andal dan memiliki daya saing dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional dalam rangka menunjang perekonomian daerah." Sedangkan misi adalah :

1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur Transportasi yang memiliki daya saing dan terpadu didukung oleh sistem perencanaan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui pemeliharaan infrastruktur, pengembangan transportasi massal dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Transportasi yang Efisien dan Efektif dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang terpadu, tertib, daman, lancar, nyaman, selamat dan terjangkau.
4. Memperluas jaringan pelayanan dan penyediaan akses Transportasi untuk mendukung Distribusi Barang/Jasa melalui pengembangan transportasi multi moda.
5. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja kelembagaan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten, berkualitas, profesional dan menguasai teknologi.

e. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 , Adapun telaahan Rencana tata Ruang Wilayah di dalam dokumen Renstra ini :

1. Pengembangan dan Peningkatan Terminal Penumpang Type B di Kecamatan Bram Itam;
2. Peningkatan Terminal Penumpang Type C di Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Betara, Kecamatan Merlung, Kecamatan Pengabuan,

Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Tebing Tinggi;

3. Program Pembangunan Jalur Kereta Api Antar Kota di Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Merlung, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Batang Asam;
4. Program Pembangunan Jaringan Jaringan Jalur Kereta apai di 13 Kecamatan;
5. Program Pembangunan Stasiun Kreta Api di Kecamatan Merlung, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Tungkal Ilir;
6. Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan lintas penyeberangan dalam kabupaten di Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Tungkal ulu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam;
7. Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan Kelas I di Pelabuhan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkl Ilir
8. Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan pelabuhan pengumpan regional di Pelabuhan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkl Ilir
9. Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan Pelabuhan pengumpan lokal di Pelabuhan Muara Deli Kecamatan Kuala Betara dan Pelabuahan betara di kuala betara;

10. Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan pelabuhan perikanan pantai di Kecamatan Tungkal Ilir
11. Pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan di Semua Kecamatan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLH memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Tabel 2.9

Identifikasi KLHS Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat (Nama Program yang memberikan dampak lingkungan)	Permasalahan DInas Perhubungan kabupaten Tanjung Jabung Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Program Pelayanan Lalu Lintas	Masih adanya ruas jalan yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas yang berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan	Masih adanya ruas jalan yang dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas	Forum Lalu Lintas dan Angkuta Jalan; Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2	Program Pelayanan Angkutan	Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji emisi gas buang	Masih rendahnya kepedulian pemilik/awak angkutan umum terhadap dampak emisi gas buang kendaraan	Ketersediaan gedung dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor (uji emisi gas buang)

2.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas

pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa lima tahun mendatang. Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana angkutan darat dan laut;

2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selaian untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan;
3. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih;
4. Masih adanya kawasan yang berlum terlayaninya trayek angkutan kota;
5. Masih rendahnya pengawasan pengendalian angkutan umum Angdes yang melintasi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Kesenjangan minat pada layanan terminal tipe c ;
7. Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji;
8. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan pada ruas jalan nasional dan/atau provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berbagai isu strategis tersebut, bila dianalisis dan ditelaah lebih lanjut mengerucut pada 2 isu strategis utama yakni :

1. Kesenjangan yang makin besar antara perkembangan kebutuhan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan sarana prasarana angkutan darat dan laut yang tersedia;
2. Manajemen rekayasa lalu lintas, manajemen angkutan dan pengendalian lalu lintas belum optimal.

Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis OPD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenanngan Dinas Perhubungan	Permasalahan OPD	Isu KLHS yang Relevan Dengan OPD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevansi Dengan OPD			Isu Strategis OPD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kesenjangan yang makin besar antara perkembangan kebutuhan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan sarana prasarana angkutan darat dan laut yang tersedia;	Masih belum optimalnya sarana dan prasarana angkutan darat dan laut	Integrasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ke dalam rencana tata ruang wilayah yang berkelanjutan.	Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas	Konektivitas Transportasi Nasional:	Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Manajemen rekayasa lalu lintas, manajemen angkutan dan pengendalian lalu lintas belum optimal	Belum optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Pengelolaan Pelayaran	- Pengurangan Emisi Gas Buang - Transportasi Ramah Lingkungan/ Berkelanjutan (Economic Blue Transportation)	Keselamatan dan Keamanan	Keselamatan Transportasi	Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan Penyelenggaraan LLAJ dan Pengelolaan Pelayaran

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Visi Tanjung Jabung Barat "Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI" (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri, dan ber-inovasi).

Relevansi pemenuhan capaian Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkaitan dengan urusan Dinas Perhubungan termuat pada :

1. **Misi 3 yaitu Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.**
2. **Misi 2 Berkah dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendukung pemenuhan visi & misi 3 Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut **"Terwujudnya Kualitas Pelayanan dan Konektivitas Transportasi Dari Desa Ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi"** mendukung pada pemenuhan Misi 2 dan **"Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"** mendukung pada pemenuhan Misi 2.

Sedangkan Sasaran Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Lalu Lintas Darat dan Laut
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah

Keterkaitan tujuan dan sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam **Tabel 3.1**

Tabel 3.1
VISI, MISI TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

.

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Sasaran					
					2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dan Konektivitas Transportasi Dari Desa ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.	1.1. Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	4 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
			1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/ Terminal Pertahun	275.151 Orang /37.260 Ton	280.000 Orang /40.000 Ton	280.050 Orang /40.050 Ton	280.100 Orang /40.100 Ton	280.150 Orang /40.150 Ton	280.200 Orang /40.200 Ton	
			1.1.3. Angka Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) Ruas Jalan	(0,27) B	(0,30)B	(0,32) B	(0,34) B	(0,36) B	(0,40) B	

		1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.2.1. Jumlah Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia	31 Unit	35 Unit	40 Unit	45 Unit	50 Unit	55 Unit
			1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	1150 Unit	1170 Unit	1180 Unit	1210 Unit	1300 Unit	1350 Unit
			1.2.3. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	50 Kasus	40 Kasus	30 Kasus	20 Kasus	10 Kasus	5 Kasus
	2. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah	2.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	70	80	82	84	86	88
			2.1.2. Nilai SAKIP OPD	73,61 (BB)	80,01 (A)	83 (A)	87 (A)	90 (A)	92 (A)
			2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	0 Temuan	0	0	0	0	0

3.2. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan renstra dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis.

Hasil identifikasi terdapat 4 (empat) penyataan Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 diantaranya :

1. Jumlah halte sungai yang terbangun belum memenuhi target
2. Peningkatan kapasitas penumpang dan jumlah barang yang melalui pelabuhan setiap tahunnya
3. Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) Ruas Jalan dengan Rasio B
4. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan yang belum optimal
5. Pengujian kendaraan belum dilakukan secara berkala
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib berlalu lintas

Sesuai dengan perhitungan skala resiko terdapat pernyataan resiko yang membutuhakan Rencana Tindak Pengendalian. Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sesuai tabel 4.3 berikut.

Tabel 3.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Pernyataan Resikoo	Skala Resiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Lalu Lintas Darat Pertumbuhan Ekonomi.	Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	Jumlah halte sungai yang terbangun belum memenuhi target	12,00	Kebutuhan volume anggaran yang besar	Menghambat pertumbuhan ekonomi dan penghubung antar wilayah perairan	Mendorong Peningkatan jumlah pembangunan halte sungai antar desa yang saling terhubung melalui dana APBN	Dishub	12 Bulan setiap tahun
	Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan /Dermaga/ Terminal Pertahun	Peningkatan kapasitas penumpang dan jumlah barang yang melalui pelabuhan setiap tahunnya	15,94	Ketersediaan sarana dan prasarana layanan transportasi yang kurang memadai	Keterlambatan operasional keberangkatan dan kedatanagn kapal sehingga terjadi antrian panjang dan penump Survey laik ruas jalan bebas hambatan (V/C Ratio) ukan orang/barang di pelabuhan	1. Membuat pengembangan fasilitas pelabuhan seperti pengembangan dermaga dua dan fasilitas pendukung lainnya 2. 2. Penambahan Kapal Operasional Penyeberangan	Dishub	12 Bulan setiap tahun

	Angka Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT)	Ruas jalan dengan nilai rasio C	15,00	Bahu jalan, tipe jalan dan hambatan samping tidak sesuai standar karena masih banyak pemukiman warga dan pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan	Berpengaruh signifikan terhadap kemacetan dan kecelakaan lalu lintas	Survey laik ruas jalan bebas hambatan (V/C Ratio)	Dishub, Sat Lantas Polri, PM, Babinsa, Satpol PP	12 Bulan setiap tahun
Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	Jumlah Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia	Penyediaan fasilitas keselamatan jalan yang	14,25	Keterbatasan anggaran	Angka kecelakaan meningkat	Pengadaan Rambu Lalu Lintas,	Dishub, BKAD	12 Bulan setiap tahun
	Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	Pengujian kendaraan belum dilakuka	7,50	Masih kurangnya kendaraan yang memenuhi standar laik angkutan jalan	Angka kecelakaan meningkat	Melakukan Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor,	Dishub	12 Bulan setiap tahun

	Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib berlalu lintas	16,88	Kurang sosialisasi/ Fasilitas Keselamatan	Masyarakat pelanggar tata tertib lalu lintas meningkat	1. Melakukan Sosialiasasi Keselamatan Jalan secara Langsung dan Media 2. Melakukan Penegakan GAKUM dan Razia Gabungan	Dishub dan Satlantas	12 Bulan setiap tahun

4.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah -langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dicapai. Rumusan strategi dilakukan melalui metode analisa SWOT dalam melihat *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman) dan diformulasikan dalam pohon kinerja yang merupakan landasan berpikir logis dari proses bisnis yang dilakukan. Pohon Kinerja merupakan alat bantu untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Rumusan strategi yang disusun bersifat operasional yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan – kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

a. STRATEGI

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah dengan:

1. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatkan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong mobilitas dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.

2. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang aman dan berkualitas
3. Meningkatkan kemampuan ruas jalan untuk melayani kebutuhan arus lalu lintas sesuai dengan fungsinya yang dapat diukur dan dibandingkan dengan standar tingkat pelayanan jalan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.
5. Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala .
6. Melakukan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.

b. Penahapan Pembangunan Renstra Dinas Perhubungan

Disamping itu, langkah selanjutnya adalah penahapan Pembangunan yang merupaka prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan. Penahapan Renstra Dinas Perhubungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Penahapan Renstra OPD

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Identifikasi dan penetapan prioritas konektivitas antar wilayah terisolir dan pusat pertumbuhan;	Pengembangan pelabuhan rakyat dan dermaga desa di kawasan pesisir dan sungai;	Pembangunan infrastruktur penunjang logistik, seperti jalan produksi, rest area, dan simpul transportasi;	Pengembangan transportasi publik lokal (angkutan pedesaan/angkutan perintis).	Monitoring dan evaluasi dampak konektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

c. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi wilayah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Kebijakan tersebut disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2045 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam menjabarkan sasaran daerah, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari perumusan arah kebijakan pembangunan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran	➢ Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur konektivitas wilayah	✓ Dukungan Akses Transportasi Ke Sentra Produksi Pertanian Perikanan, Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonmi, Objek Wisata dan Simpul Transportasi	
2	Permenhub RI Nomor 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek	➢ Pembangunan dan peningkatan akses jalan, jembatan, dan transportasi antar wilayah	✓ Penyelenggaraan angkutan massal	
3	Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023	➢ Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan penghubung antar	✓ Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kapasitas ruas jalan yang terpadu	

		desa, kecamatan, dan kabupaten	dengan tata ruang wilayah, sesuai dengan standar angkutan jalan.	
4	Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	➢ Penyediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai	✓ Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ	
5	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	➢ Pengembangan transportasi publik lokal (angkutan pedesaan/angkutan perintis).	✓ Penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.	
6	- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas	➢ Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ketertiban umum	✓ Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi	

Visi & Misi RPJMD

Visi RPJMD	**"Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI" (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri, dan ber-inovasi)".**
Misi RPJMD :	
Misi 1	**Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;**
Misi 2	**Berkah dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
Misi 3	**Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan**

Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Misi 3 RPJMD yaitu Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan. Dengan Sasasaran Menurunnya ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan pendapata

TABEL 4.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029

Visi RPJMD : "Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI" (Berkualitas, Ekonomi Maju,

MISI RPJMD
- **Misi 3 : Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan**

- **Tujuan RPJMD** Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
- **Sasara RPJMD :**
  - Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
  - Meningkatnya kesetaraan akses infrastruktur dan keuangan

Arah Pembangunan RPJMD :
- Konektivitas Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan transportasi

Strategi RPJMD :
- Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan transportasi

Arah Kebijakan RPJMD :
- Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, kawasan pergudangan/stockyad yang modern terintegrasi)
- Peningkatan sarana prasarana perhubungan
- Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur konektivitas wilayah
- penyediaan infrastruktur dasar untuk kawasan ekonomi dan industri

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja OPD	Analisis Capaian Tujuan		
			Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD	Program
2. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dan Konektivitas Transportasi Dari Desa ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.	2.1. Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	2.1.1. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatkan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong mobilitas dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.	Dukungan Akses Transportasi Ke Sentra Produksi Pertanian Perikanan, Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonmi, Objek Wisata dan Simpul Transportasi	Program Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		2.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang aman dan berkualitas	Penyelenggaraan angkutan massal	Program Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	2.1.3. Angka Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) Ruas Jalan	Meningkatkan kemampuan ruas jalan untuk melayani kebutuhan arus lalu lintas sesuai dengan fungsinya yang dapat diukur dan dibandingkan dengan standar tingkat pelayanan jalan.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kapasitas ruas jalan yang terpadu dengan tata ruang wilayah, sesuai dengan standar angkutan jalan.	Program lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		2.1.4. Jumlah Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia	Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.	Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ	Program lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

		2.1.5. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala .	Penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.	Program lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		2.1.6. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	Melakukan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.	Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi.	Program lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) & Program Pengelolaan Pelayaran
3. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja	3.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan	3.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government. Pemerintahan.	Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Perangkat Daerah	Pengelolaan Resiko OPD	3.1.2. Nilai SAKIP OPD	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		3.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.	Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Fokus Sasaran Dinas Perhubungan Berkaitan dengan Renstra Kementerian Perhubungan :

- **Sasaran Kegiatan Perhubungan : Peningkatan Konektivitas dan Aksebilitas**
  Indikator/tolak ukur : Jumlah Perencanaan Dokumen Halte Sungai
- **Sasaran Kegiatan Perhubungan : Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi**
  Indikator/tolak ukur : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai dan Danau
- **Sasaran Kegiatan Perhubungan : Peningkatan Keselamatan dan Keamanan**
  Indikator/tolak ukur : Penyediaan Rambu Rambu dan Penegakan Gakum

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar- benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada penyusunan program dan kegiatan perlu juga menetapkan indikator kinerja mengacu pada beberapa kriteria antara lain (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegatan Renstra Dinas Perhubungan

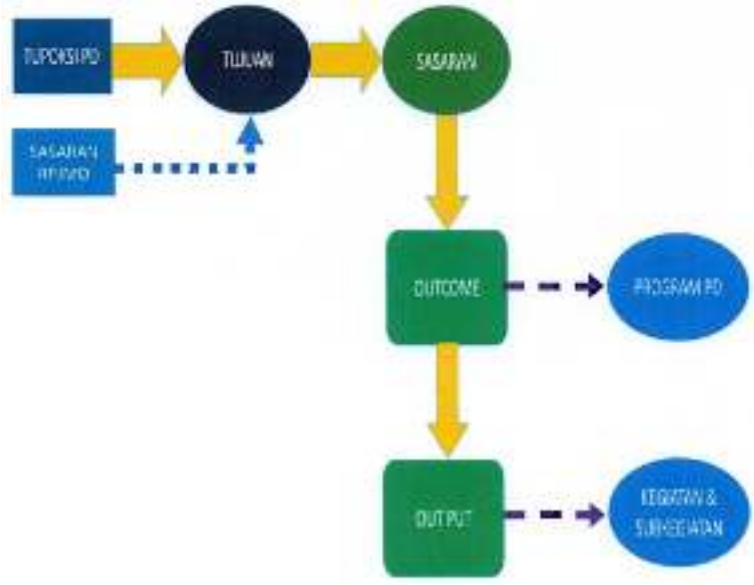

4.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2025-2029 yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Terdapat 3 program 31 Kegiatan dan 136 SubKegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra Perubahan 2025 -2029 sebagaimana Tabel 6.1 Sebagai berikut :

A. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

   Sub Kegiatan :

   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

   Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   g. Penyediaan Bahan/Material
   h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   Sub Kegiatan :

   a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pengadaan Mebel
   d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
   f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daeraha.

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
b. Pembangunan Gedung Terminal
c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
e. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan :

a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

e. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
f. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian erkala Kendaraan Bermotor

6. **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**

   Sub Kegiatan :

   a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   b. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
   c. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

7. **Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**

   Sub Kegiatan :

   a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
   b. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
   c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
   d. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

8. **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**

   Sub Kegiatan :

   a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

9. **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

   Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

10. **Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

    Sub Kegiatan :

    a. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
    b. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan

11. **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

    Sub Kegiatan :

    a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

12. **Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

    Sub Kegiatan :

    a. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

1. **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**

   Sub Kegiatan :

   a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

2. **Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**

   Sub Kegiatan :

   a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

3. **Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**

   Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan

Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

b. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. **Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

   Sub Kegiatan :

   a. Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
   b. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
   c. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota

5. **Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**

   Sub Kegiatan:

   a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
   b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk danDaerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

6. **Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau**

   Sub Kegiatan :

   a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
   b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
   c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

7. **Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**

   Sub Kegiatan :

   a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
   b. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
   c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
   d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

8. **Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**

   Sub Kegiatan :

   a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
   b. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
   c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

9. **Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal**

   Sub Kegiatan :

   a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhadi Pelabuhan Pengumpan Lokal

10. **Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**

    Sub Kegiatan :

    a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
    b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

11. **Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal**

    Sub Kegiatan :

    a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
    b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

12. **Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal**

    Sub Kegiatan :

    a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
    b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

4.2 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan kegiatan dalam setiap programnya.

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung BaratTahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Batrat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indkator	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/dan Kegiatan (output)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (PERBUP NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA DINAS PERHUBUNGAN)	2. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Rasio Nilai SAKIP OPD			
		2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah			Persentase Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah Yang Terpenuhi			

			2.1.1Meningkatnya kepuasan dan pelayanan perangkat daerah yang berkualitas, akuntabel, transparan, dan efektif		**Persentase kepuasan dan pelayanan perangkat daerah yang berkualitas, akuntabel, transparan, dan efektif**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana**	
				2.1.1.1Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Tepat Sasaran.	**Jumlah Indikator SAKIP yang terpenuhi**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	**Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	

				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir TahunSKPD	

				Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	**2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumla Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

				Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	**Jumlah Indikator SAKIP yang terpenuhi**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Yang Tersedia	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
				Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	**2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase meningkatnya Administrasi Umum Prangkat Daerah**	

				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan danJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	

				Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanya ng Disediakan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	

				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	**2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah OPD yang tersedia**	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	

				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
				Tersedianya Mebel		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	

				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
				Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	**2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jas Penunjang Urusan Yang Tersedia**	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	

				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yangDisediakan	
				Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	**2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bangunan/kendaraan Kantor Kondisi Baik**	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	

				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

UU Nomor 22 Tahun 2009 Tetang Angkutan Jalan	**1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dan Konektivitas Transportasi Dari Desa ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.**							
		1.1. Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut						
			Meningkatnya aksesibilitas, kelancaran, dan keterhubung					

			an transportasi antara desa					
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi Darat				
					Persentase kelengkapan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	
				Meningkatnya Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/ Dermaga/Terminal Pertahun	1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJKabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJKabupaten/Kota yang tersedia	

				Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	

				Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		2.15.02.2.01.0006 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia	**1.2.1. Jumlah Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia**	

				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia	**1.2.1. Jumlah Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	
				Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	

				Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C		2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	
				Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang		2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	
				Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	

				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	
				Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola TerminalTipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
				Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	**1.2.3. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia**	

				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	**1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	

				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah aparatur yang mengikuti diklJumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnyaat struktural	
				Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

				Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Identifikasi dan Analisis Potensi JumlahKendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	
				Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	**1.2.3. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan**	

						Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)		2.15.02.2.06.0010 Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	
				Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		2.15.02.2.06.0013 Pembangunan	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	

						Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		
				Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

				Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	**1.2.3. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut**	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	
				Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin		2.15.02.2.07.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	

				Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	
				Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin		2.15.02.2.07.00 08 Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	
				Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	**1.2.3. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut**	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	

				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraaan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		2.15.02.2.08.0008 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	

				Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
				Meningkatnya Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/ Dermaga/Terminal Pertahun	**1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	

				Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	
				Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

				Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	**Jumlah Jaringan Trayek Yang Tersedia**	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Meningkatnya Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/ Dermaga/Terminal Pertahun	**1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orangdalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orangdalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

				Meningkatnya Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/ Dermaga/Terminal Pertahun	**1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun**	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

UU Nomor 22 Tahun 2009 Tetang Angkutan Jalan	**1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dan Konektivitas Transportasi Dari Desa ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.**							
		1.1. Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut						
			Meningkatnya aksesibilitas, kelancaran, dan keterhubung					

			an transportasi antara desa					
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi Darat				
					Rasio Konektivitas Laut	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran**	

				Meningkatnya Mobiliyas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/ Dermaga/Terminal Pertahun	**1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun**	**2.15.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota**	

				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

				Meningkatnya Mobiliyas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/ Dermaga/Terminal Pertahun	**1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun**	**Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**	

				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinUsaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili OrangPerseorangan Warga Negara Indonesia atau BadanUsaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalamSistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasisecara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinUsaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili OrangPerseorangan Warga Negara Indonesia atau BadanUsaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalamSistem Pelayanan Perizinan Berusaha	

				Meningkatnya Mobiliyas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/ Dermaga/Terminal Pertahun	**1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun**	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**	

				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinPelabuhan Sungai dan Danau yang MelayaniTrayek dalam 1 Daerah Kabupaten/KotaKewenangan Kabupaten/Kota dalam SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secaraElektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinPelabuhan Sungai dan Danau yang MelayaniTrayek dalam 1 Daerah Kabupaten/KotaKewenangan Kabupaten/Kota dalam SistemPelayanan Perizinan Berusaha	

				Meningkatnya Mobiliyas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/ Dermaga/Terminal Pertahun	**1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun**	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**	

				Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	

				Terkendaliny a dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberang an dan Disetujuinya Pengoperasia n Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberang an dalam Daerah Kabupaten/K ota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/K ota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/K ota dalam Daerah Kabupaten/K ota		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan LintasPenyebe rangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Ko ta yangTerletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Ko tadan/atau Jaringan Jalur Kereta ApiKabupaten /Kota dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kot a yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kot a dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kot a dalam Daerah Kabupaten/Kot a	

				Meningkatnya Mobiliyas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/ Dermaga/Terminal Pertahun	**1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun**	**2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	

				Terkendaliny a dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberang an dan terkendaliny a dan terawasinya izin persetujuan pengoperasia n untuk angkutan Sungai, Danau dan Penyeberang an dalam Daerah Kabupaten/K ota		2.15.03.2.06.0 004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberanga n dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberanga n dalam Daerah Kabupaten/Ko ta yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Ko ta dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Ko ta dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kot a yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kot a dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kot a dalam Daerah Kabupaten/Kot a	

				Meningkatnya Mobiliyas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/ Dermaga/Terminal Pertahun	**1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun**	**2.15.03.2.08 Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal**	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal**	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		2.15.03.2.08.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

				Meningkatnya Mobiliyas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/ Dermaga/Terminal Pertahun	**1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun**	**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	

				Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya KetersediaanHalte Sungai	**1.1.1. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia**	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	

				Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal\	
				Meningkatnya Ketersediaan Halte Sungai	**1.1.1. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia**	**Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau**	

				Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk danDaerah Lingkungan Kerja (DLKR)/DaerahLingkungan Kepentingan (DLKP) untuk PelabuhanSungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	

				Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) PelabuhanSungai dan Danau		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Meningkatnya KetersediaanHalte Sungai	**1.1.1. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia**	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	

				Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	
				Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	
				Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal		2.15.03.2.12.0005 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan loka	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	
				Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	

				Meningkatnya KetersediaanHalte Sungai	**1.1.1. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia**	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	
				Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	
				Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	
				Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau		2.15.03.2.13.0009 Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	

				Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau		Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau		Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	
				Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan		Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberanga	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	

				Meningkatnya Mobiliyas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/ Dermaga/Terminal Pertahun	**1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun**	**Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal**	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	
				Meningkatnya Mobiliyas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/ Dermaga/Terminal Pertahun	**1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun**	**Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**	

				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Meningkatnya Mobiliyas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/ Dermaga/Terminal Pertahun	**1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun**	**Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal**	

				Terlaksanany a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Koordinasi dan Sinkronisasi PengawasanPe laksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan diWilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan	
				Meningkatn ya Mobiliyas Orang/Bara ng Melalui Pelabuhan/ Dermaga/Te rminal Pertahun	**1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/De rmaga/Termi nal Pertahun**	**2.15.03.2.18 Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal**	

				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		2.15.03.2.18.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Meningkatnya Mobiliyas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/ Dermaga/Terminal Pertahun	**1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun**	**Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal**	

				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2030

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	%	100	100	Rp 6.621.600.000	100	Rp 7.402.600.000	100	Rp 7.688.600.000	100	Rp 7.299.600.000,00	100	Rp 7.475.916.000	100	Rp 7.475.916.000	Dishub
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%	16	16	Rp 49.000.000	16	Rp 49.000.000	16	Rp 49.000.000	16	Rp 49.000.000,00	16	Rp 49.000.000	16	Rp 49.000.000	Dishub

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	Rp 27.000.000	9	Rp 27.000.000	9	Rp 27.000.000	9	Rp 27.000.000	9	Rp 27.000.000	9	Rp 27.000.000	Dishub
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	Rp 12.000.000	4	Rp 12.000.000	4	Rp 12.000.000	4	Rp 12.000.000	4	Rp 12.000.000	4	Rp 12.000.000	Dishub
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	Rp 10.000.000	3	Rp 10.000.000	3	Rp 10.000.000	3	Rp 10.000.000	3	Rp 10.000.000	3	Rp 10.000.000	Dishub

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Laporan**	**100**	**100 %**	**Rp 4.305.000.000**	**100%**	**Rp 4.305.000.000**	**100%**	**Rp 4.305.000.000**	**100%**	**Rp 4.305.000.000,00**	**100%**	**Rp 4.305.000.000**	**100%**	**Rp 4.305.000.000**	Dishub
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan/Orang	12/30	12/40	Rp 4.000.000.000	12/40	Rp 4.000.000.000	12/40	Rp 4.000.000.000	12/40	Rp 4.000.000.000	12/40	Rp 4.000.000.000	12/40	Rp 4.000.000.000	Dishub
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	Dishub
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub

Administrasi Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah**	**%**	**0**	**100**	**Rp 90.000.000**	**100**	**Rp 90.000.000**	**100**	**Rp 90.000.000**	**100**	**Rp 90.000.000,00**	**100**	**Rp 90.000.000**	**100**	**Rp 90.000.000**	Dishub
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumla Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Unit	8	7	Rp 80.000.000	7	Rp 80.000.000	7	Rp 80.000.000	7	Rp 80.000.000	7	Rp 80.000.000	7	Rp 80.000.000	Dishub
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Orang**	**132**	**142**	**Rp 260.000.000**	**142**	**Rp 260.000.000**	**142**	**Rp 260.000.000**	**141**	**Rp 230.000.000,00**	**142**	**Rp 260.000.000**	**142**	**Rp 260.000.000**	Dishub
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Yang Tersedia	Stel	132	140	Rp 200.000.000	140	Rp 200.000.000	140	Rp 200.000.000	140	Rp 200.000.000	140	Rp 200.000.000	140	Rp 200.000.000	Dishub
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	2	Rp 60.000.000	2	Rp 60.000.000	2	Rp 60.000.000	1	Rp 30.000.000,00	2	Rp 60.000.000	2	Rp 60.000.000	Dishub
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase meningkatnya Administrasi Umum Prangkat Daerah**	**%**	**1**	**100 %**	**Rp 526.600.000**	**100%**	**Rp 542.600.000**	**100%**	**Rp 563.600.000**	**100%**	**Rp 584.600.000,00**	**100%**	**Rp 605.600.000**	**100%**	**Rp 605.600.000**	Dishub

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	210	210	Rp 50.000.000	210	Rp 6.000.000	210	Rp 7.000.000	210	Rp 8.000.000	210	Rp 9.000.000	210	Rp 9.000.000	Dishub
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan danJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Perlengkapan Kantor	Paket	17	4	Rp 70.000.000	4	Rp 75.000.000	4	Rp 80.000.000	4	Rp 85.000.000	5	Rp 90.000.000	5	Rp 90.000.000	Dishub
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3	Rp 25.000.000	3	Rp 25.000.000	3	Rp 25.000.000	3	Rp 25.000.000	3	Rp 25.000.000	3	Rp 25.000.000	Dishub

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotak	600	600	Rp 40.000.000	600	Rp 40.000.000	600	Rp 40.000.000	600	Rp 40.000.000	600	Rp 40.000.000	600	Rp 40.000.000	Dishub
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	Rp 35.000.000	1	Rp 40.000.000	1	Rp 45.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 55.000.000	1	Rp 55.000.000	Dishub
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undanganyang Disediakan	Dokumen	1	1	Rp 6.600.000	1	Rp 6.600.000	1	Rp 6.600.000	1	Rp 6.600.000	1	Rp 6.600.000	1	Rp 6.600.000	Dishub

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	Rp 300.000.000	12	Rp 350.000.000	12	Rp 360.000.000	12	Rp 370.000.000	12	Rp 380.000.000	12	Rp 380.000.000	Dishub
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah OPD yang tersedia**	**Unit**	**2**	**5**	**Rp 220.000.000**	**166**	**Rp 970.000.000**	**172**	**Rp 1.220.000.000**	**177**	**Rp 855.000.000,00**	**183**	**Rp 980.000.000**	**183**	**Rp 980.000.000**	Dishub
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	Rp -	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	Dishub

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2	Rp 70.000.000	3	Rp 110.000.000	2	Rp 80.000.000	2	Rp 85.000.000	2	Rp 90.000.000	2	Rp 90.000.000	Dishub
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	2	Rp 100.000.000	150	Rp 110.000.000	155	Rp 120.000.000	160	Rp 130.000.000	165	Rp 140.000.000	165	Rp 140.000.000	Dishub
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	Rp 50.000.000	10	Rp 100.000.000	11	Rp 120.000.000	12	Rp 140.000.000	13	Rp 150.000.000	13	Rp 150.000.000	Dishub
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	Rp -	1	Rp 100.000.000	2	Rp 300.000.000	2	Rp 350.000.000	2	Rp 400.000.000	2	Rp 400.000.000	Dishub

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	Rp -	1	Rp 50.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	Dishub
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jas Penunjang Urusan Yang Tersedia**	**Bulan**	**12**	**12**	**Rp 186.000.000**	**12**	**Rp 201.000.000**	**12**	**Rp 216.000.000**	**12**	**Rp 201.000.000,00**	**12**	**Rp 201.316.000**	**12**	**Rp 201.316.000**	Dishub
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	Rp 6.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 1.316.000	1	Rp 1.316.000	Dishub
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	Rp 150.000.000	1	Rp 160.000.000	1	Rp 170.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	Dishub

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yangDisediakan	Laporan	1	1	Rp 30.000.000	1	Rp 35.000.000	1	Rp 40.000.000	1	Rp 45.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	Dishub
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bangunan/kendaraan Kantor Kondisi Baik**	**Unit**	**142**	**81**	**Rp 985.000.000**	**81**	**Rp 985.000.000**	**81**	**Rp 985.000.000**	**81**	**Rp 985.000.000**	**81**	**Rp 985.000.000**	**81**	**Rp 985.000.000**	Dishub
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	2	Rp 100.000.000	2	Rp 100.000.000	2	Rp 100.000.000	2	Rp 100.000.000	2	Rp 100.000.000	2	Rp 100.000.000	Dishub

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	95	32	Rp 500.000.000	32	Rp 500.000.000	32	Rp 500.000.000	32	Rp 500.000.000	32	Rp 500.000.000	32	Rp 500.000.000	Dishub
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	44	44	Rp 35.000.000	44	Rp 35.000.000	44	Rp 35.000.000	44	Rp 35.000.000	44	Rp 35.000.000	44	Rp 35.000.000	Dishub
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	Rp 350.000.000	3	Rp 350.000.000	3	Rp 350.000.000	3	Rp 350.000.000	3	Rp 350.000.000	3	Rp 350.000.000	Dishub
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase kelengkapan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal**	**%**	60	**62**	**Rp 1.669.000.000**	**64**	**Rp 2.451.000.000**	**66**	**Rp 3.390.000.000**	**66**	**Rp 2.719.000.000**	**68**	**Rp 4.088.000.000**	**70**	**Rp 4.088.000.000**	Dishub

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia**	**Dokumen**	0	3	**Rp 35.000.000**	3	**Rp 135.000.000**	4	**Rp 535.000.000**	5	**Rp 85.000.000**	4	**Rp 85.000.000**	4	**Rp 85.000.000**	Dishub
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp -	1	Rp 100.000.000	1	Rp 500.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	Dishub
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	Dishub
2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	Dishub

2.15.02.2.01.0006 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Dishub
2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Dishub
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia**	**Unit**	**90**	**30**	**Rp 54.000.000**	**45**	**Rp 178.000.000**	**50**	**Rp 187.000.000**	**55**	**Rp 196.000.000**	**60**	**Rp 205.000.000**	**60**	**Rp 205.000.000**	Dishub
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	90	30	Rp 54.000.000	35	Rp 63.000.000	40	Rp 72.000.000	45	Rp 81.000.000	50	Rp 90.000.000	50	Rp 90.000.000	Dishub

2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Unit	4	0	Rp -	10	Rp 115.000.000	10	Rp 115.000.000	10	Rp 115.000.000	10	Rp 115.000.000	10	Rp 115.000.000	Dishub
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**%**	**0**	**100 %**	**Rp 85.000.000**	**100%**	**Rp 125.000.000**	**100%**	**Rp 125.000.000**	**100%**	**Rp 190.000.000**	**100%**	**Rp 1.585.000.000**	**100%**	**Rp 1.585.000.000**	Dishub
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	0	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 75.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Dishub
2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Dokumen	0	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub

2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 1.500.000.000	1	Rp 1.500.000.000	Dishub
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit	0	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	Dishub
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	2	Rp 20.000.000	2	Rp 20.000.000	2	Rp 20.000.000	2	Rp 20.000.000	2	Rp 20.000.000	2	Rp 20.000.000	Dishub
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola TerminalTipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	0	Rp -	2	Rp 40.000.000	0	Rp -	2	Rp 40.000.000	-	Rp -	-	Rp -	Dishub

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia**	**Dokumen**	**0**	**0**	**Rp -**	**2**	**Rp 10.000.000**	**2**	**Rp 10.000.000**	**2**	**Rp 10.000.000**	**100%**	**Rp 10.000.000**	**100%**	**Rp 10.000.000**	Dishub
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0	-	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	-	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**%**	**0**	**100**	**Rp -**	**100**	**Rp 228.000.000**	**100**	**Rp 728.000.000**	**100**	**Rp 238.000.000**	**100**	**Rp 238.000.000**	**100**	**Rp 238.000.000**	Dishub
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	0	0	Rp -	2	Rp 10.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Dishub

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah aparatur yang mengikuti diklJumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnyaa t struktural	Orang	0	0	Rp -	2	Rp 40.000.000	2	Rp 40.000.000	2	Rp 40.000.000	2	Rp 40.000.000	2	Rp 40.000.000	Dishub
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Set	1000	1000	pentin	2000	Rp 60.000.000	2000	Rp 60.000.000	2000	Rp 60.000.000	2000	Rp 60.000.000	2000	Rp 60.000.000	Dishub
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Dishub

Identifikasi dan Analisis Potensi JumlahKendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 18.000.000	1	Rp 18.000.000	1	Rp 18.000.000	1	Rp 18.000.000	1	Rp 18.000.000	Dishub
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	1	0	Rp -	8	Rp 100.000.000	8	Rp 100.000.000	8	Rp 100.000.000	8	Rp 100.000.000	8	Rp 100.000.000	Dishub
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan**	**%**	**0**	**100**	**Rp 1.050.000.000**	**100**	**Rp 1.210.000.000**	**100**	**Rp 1.260.000.000**	**100**	**Rp 1.450.000.000**	**100**	**Rp 1.460.000.000**	**100**	**Rp 1.460.000.000**	Dishub
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	Rp 1.050.000.000	12	Rp 1.100.000.000	12	Rp 1.200.000.000	12	Rp 1.300.000.000	12	Rp 1.400.000.000	12	Rp 1.400.000.000	Dishub
2.15.02.2.06.0010 Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub
2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit	0	0	Rp -	1	Rp 75.000.000	0	Rp -	1	Rp 90.000.000	0	Rp -	0	Rp -	Dishub
2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	Dishub

2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	Dishub
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**%**	**0**	**100**	**Rp -**	**100**	**Rp 60.000.000**	**100**	**Rp 60.000.000**	**100**	**Rp 20.000.000**	**100**	**Rp 10.000.000**	**100**	**Rp 10.000.000**	Dishub
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 20.000.000	0	Rp -	0	Rp -	Dishub
2.15.02.2.07.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang	0	0	Rp -	2	Rp 60.000.000	2	Rp 60.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	Dishub

Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub
2.15.02.2.07.0008 Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**%**	**0**	**100**	**Rp 90.000.000**	**100**	**Rp 80.000.000**	**100**	**Rp 90.000.000**	**100**	**Rp 80.000.000**	**100**	**Rp 90.000.000**	**100**	**Rp 90.000.000**	Dishub
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	0	3	Rp 75.000.000	3	Rp 75.000.000	3	Rp 75.000.000	3	Rp 75.000.000	3	Rp 75.000.000	3	Rp 75.000.000	Dishub

2.15.02.2.08.0008 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	1	Rp 10.000.000	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Dishub
2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	0	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**0**	**100**	**Rp 350.000.000**	**100**	**Rp 400.000.000**	**100**	**Rp 370.000.000**	**100**	**Rp 420.000.000**	**100**	**Rp 390.000.000**	**100**	**Rp 390.000.000**	Dishub
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	0	0	Rp -	1	Rp 40.000.000	0	Rp -	1	Rp 40.000.000	0	Rp -	0	Rp -	Dishub

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	6	6	Rp 350.000.000	6	Rp 360.000.000	6	Rp 370.000.000	6	Rp 380.000.000	6	Rp 390.000.000	6	Rp 390.000.000	Dishub
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**0**	**100**	**Rp 5.000.000**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**100**	**Rp 5.000.000**	**100**	**Rp 5.000.000**	**100**	**Rp 5.000.000**	Dishub

Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	Rp 5.000.000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**%**	**0**	**0**	**Rp -**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	Dishub

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinPenyelenggaraan Angkutan Orang dalam TrayekKewenangan Kabupaten/Kota dalam SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi SecaraElektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	0	Rp -	0	Rp -	Dishub

Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen**	**0**	**0**	**Rp -**	**1**	**Rp 10.000.000**	**1**	**Rp 10.000.000**	**1**	**Rp 10.000.000**	**1**	**Rp 10.000.000**	**1**	**Rp 10.000.000**	Dishub
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Dishub
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Rasio Konektivitas Laut**	**%**	**47**	**50**	**Rp 6.885.000.000**	**55**	**Rp 12.730.000.000**	**60**	**Rp 15.530.000.000**	**65**	**Rp 16.535.000.000**	**70**	**Rp 13.205.000.000**	**75**	**Rp 13.205.000.000**	Dishub

2.15.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**0**	**0**	**Rp 5.000.000**	**1**	**Rp 5.000.000**	**1**	**Rp 5.000.000**	**1**	**Rp 5.000.000**	**1**	**Rp 5.000.000**	**1**	**Rp 5.000.000**	Dis hub
2.15.03.2.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub

Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	%	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinUsaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili OrangPerseorangan Warga Negara Indonesia atau BadanUsaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalamSistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasisecara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinUsaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili OrangPerseorangan Warga Negara Indonesia atau BadanUsaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalamSistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub

Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinPelabuhan Sungai dan Danau yang MelayaniTrayek dalam 1 Daerah Kabupaten/KotaKewenangan Kabupaten/Kota dalam SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secaraElektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinPelabuhan Sungai dan Danau yang MelayaniTrayek dalam 1 Daerah Kabupaten/KotaKewenangan Kabupaten/Kota dalam SistemPelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub

Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	%	0	0	Rp 1.190.000.000	1	Rp 1.295.000.000	1	Rp 1.395.000.000	1	Rp 1.495.000.000	1	Rp 1.595.000.000	1	Rp 1.595.000.000	Dishub

Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub

Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	Rp 1.190.000.000	12	Rp 1.290.000.000	12	Rp 1.390.000.000	12	Rp 1.490.000.000	12	Rp 1.590.000.000	12	Rp 1.590.000.000	1

2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**%**	**0**	**0**	**Rp**	**5.000.000**	**1**	**Rp 5.000.000**	**1**	**Rp 5.000.000**	**1**	**Rp 5.000.000**	**1**	**Rp 5.000.000**	**1**	**Rp 5.000.000**	Dis hub

2.15.03.2.06.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dishub

2.15.03.2.08 Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	**%**	**0**	**0**	**Rp 5.000.000**	**1**	**Rp 5.000.000**	**1**	**Rp 5.000.000**	**1**	**Rp 5.000.000**	**1**	**Rp 5.000.000**	**1**	**Rp 5.000.000**	Dis hub
2.15.03.2.08.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dok	0	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub

Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**0**	**0**	**Rp -**	**1**	**Rp 5.000.000**	**1**	**Rp -**	**1**	**Rp 5.000.000**	**1**	**Rp -**	**1**	**Rp -**	Dishub
Penyediaan Data dan Informasi Tarif AngkutanPenyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi danKendaraan beserta Muatannya pada LintasPenyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	0	Rp -	0	Rp 5.000.000	0	Rp -	0	Rp -	Dishub

Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	**Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**%**	**0**	**0**	**Rp -**	**1**	**Rp 1.500.000.000**	**1**	**Rp 300.000.000**	**1**	**Rp -**	**1**	**Rp -**	**1**	**Rp -**	Dishub
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal\	Dokumen	0	0	Rp -	1	Rp 1.500.000.000	1	Rp 300.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	Dishub

Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	**Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau**	**%**	**0**	**0**	**Rp 450.000.000**	**1**	**Rp 750.000.000**	**1**	**Rp 225.000.000**	**1**	**Rp 225.000.000**	**1**	**Rp 200.000.000**	**1**	**Rp 200.000.000**	Dis hub
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daera h Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Doku men	0	3	Rp 450.000.000	3	Rp 750.000.000	2	Rp 200.000.000	2	Rp 200.000.000	2	Rp 200.000.000	2	Rp 200.000.000	Dis hub

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 25.000.000	2	Rp 25.000.000	0	Rp -	0	Rp -	Dishub
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan danPengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	**Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan danPengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**%**	**0**	**100**	**Rp 760.000.000**	**100**	**Rp 3.810.000.000**	**100**	**Rp 4.360.000.000**	**100**	**Rp 4.710.000.000**	**100**	**Rp 4.960.000.000**	**100**	**Rp 4.960.000.000**	Dishub

Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	0	0	Rp -	1	Rp 3.000.000.000	1	Rp 3.500.000.000	1	Rp 3.800.000.000	1	Rp 4.000.000.000	1	Rp 4.000.000.000	Dishub
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Laporan	0	1	Rp 200.000.000	1	Rp 250.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 350.000.000	1	Rp 400.000.000	1	Rp 400.000.000	Dishub
2.15.03.2.12.0005 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan loka	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Laporan	0	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	Dishub
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	0	1	Rp 60.000.000	1	Rp 60.000.000	1	Rp 60.000.000	1	Rp 60.000.000	1	Rp 60.000.000	1	Rp 60.000.000	Dishub

Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	**Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**%**	**0**	**100**	**Rp 4.470.000.000**	**100**	**Rp 5.270.000.000**	**100**	**Rp 9.150.000.000**	**100**	**Rp 10.000.000.000**	**100**	**Rp 6.350.000.000**	**100**	**Rp 6.350.000.000**	Dishub
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 3.500.000.000	1	Rp 4.000.000.000	0	Rp -	0	Rp -	Dishub
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	2	1	Rp 500.000.000	1	Rp 600.000.000	1	Rp 700.000.000	1	Rp 800.000.000	1	Rp 900.000.000	1	Rp 900.000.000	Dishub
2.15.03.2.13.0009 Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang	0	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 30.000.000	2	Rp 30.000.000	2	Rp 30.000.000	2	Rp 30.000.000	Dishub

Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Lapora	1	1	Rp 70.000.000	1	Rp 70.000.000	1	Rp 70.000.000	1	Rp 70.000.000	1	Rp 70.000.000	1	Rp 70.000.000	Dishub
Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit	4	1	Rp 3.000.000.000	1	Rp 3.500.000.000	1	Rp 3.600.000.000	1	Rp 3.700.000.000	1	Rp 3.800.000.000	1	Rp 3.800.000.000	Dishub
Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit	6	3	Rp 400.000.000	3	Rp 500.000.000	3	Rp 550.000.000	3	Rp 600.000.000	3	Rp 650.000.000	3	Rp 650.000.000	Dishub
Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberanga	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	0	1	Rp 500.000.000	1	Rp 600.000.000	1	Rp 700.000.000	1	Rp 800.000.000	1	Rp 900.000.000	1	Rp 900.000.000	Dishub

Penerbitan Izin Usaha untuk Badan UsahaPelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	**Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan UsahaPelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**%**	**0**	**0**	**Rp -**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	Dishub
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	Dishub
Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	**Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**%**	**0**	**0**	**Rp -**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	Dishub

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	Dishub
Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	**Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**%**	**0**	**0**	**Rp -**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	Dishub

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	Dishub
2.15.03.2.18 Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	**%**	**0**	**0**	**Rp -**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	Dishub

2.15.03.2.18.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	Dishub
Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	**%**	**0**	**0**	**Rp -**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	Dishub

Koordinasi dan Sinkronisasi PengawasanPelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untukKepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKPPelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	Dishub
					Rp 15.175.600.000		**Rp 22.583.600.000**		**Rp 26.608.600.000**		**Rp 26.553.600.000**		**Rp 24.768.916.000**		**Rp 24.768.916.000**	

4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain:

Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Indeks Infrastruktur	Jumlah Rambu Rambu Yang Terpasang	Program Penyelenggaraan LLAJ	
			Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
		Jumlah Pelabuhan/Dermaga Sungai dan Danau Yang Dibangun dan Dipelihara	Program Pengelolaan Pelayaran	
			Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
			- Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	
			- Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
			- Pembangunan Dermaga Sungai Dan Danau	
			- Pemeliharaan Dermaga Sungai Dan Danau	

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan perhubungan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029, diperlukan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:

Tabel 4.5 Relevansi Tujuan Sasaran dan IKU Dinas Perhubungan

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Angkutan Penyeberangan	1.1. Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut				
			1.1.1. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	Jumlah Halte Sungai Yang Sudah Dibangun	• Dokumen Halte Sungai Yang Dibangun/Yang Sudah Dihibahkan	Bidang Prasarana dan Keselamatan
			1.1.2. Persentase orang dan barang melalui dermaga/ terminal pertahun	Jumlah orang melalui dermaga/terminal per tahun & Jumlah barang melalui	• Laporan Kegiatan Tahunan • Data Kecelakaan Dari Kepolisian	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

				dermaga/terminal per tahun		
			1.1.3. Angka Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) Ruas Jalan	Pengukuran Kapasitas Jalan Rawan Kecelakaan Yang Memenuhi Tingkat Pelayanan Baik	• Survey dan Dokumen V/C Ratio	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
		1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	Jumlah Rambu lalu Lintas Yang Terpasang Pada Titik Rawan Kecelakaan Tahun-n	• Survey Dan Laporan Kegiatan Tahunan	Bidang Prasarana dan Keselamatan
			1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	Jumlah Kendaraan Yang Lulus Uji Elektronik	• Laporan Kegiatan Tahunan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
			1.2.3. Angka Kecelakaan lalu Lintas Darat dan Laut	Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Darat dan Laut	• Laporan Kegiatan Tahunan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
2.	Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun	Orang/Ton	280.000 Orang /40.000 Ton	280.050 Orang /40.050 Ton	280.100 Orang /40.100 Ton	280.150 Orang /40.150 Ton	280.200 Orang /40.200 Ton	280.250 Orang /40.250 Ton	
3.	Angka Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) Ruas Jalan	Rasio	(0,30)B	(0,32)B	(0,34)B	(0,36)B	(0,40)B	(0,44) B	
4.	Jumlah Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia	Unit	35 Unit	40 Unit	45 Unit	50 Unit	55 Unit	60 Unit	
5.	Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	Unit	1170 Unit	1180 Unit	1210 Unit	1300 Unit	1350 Unit	1400 Unit	
6.	Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	Kasus	40 Kasus	30 Kasus	20 Kasus	10 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	

7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Rasio	80	82	84	86	88	90	
8.	Nilai SAKIP OPD	Rasio	80,01 (A)	83 (A)	87 (A)	90 (A)	92 (A)	94(A)	
9.	Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	Temuan	0	0	0	0	0	0	

4.6. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025- 2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat. IKK yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

Tabel 4.6 Rumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	%	2	2	2	2	2	2	
2.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	1170	1180	1210	1300	1350	1400	
3.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal	Unit	2	2	2	2	2	2	
4.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	75	80	85	90	95	96	

5.	Pemasangan rambu rambu	Unit	30	35	40	45	50	60	
6.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,070	0,071	0,072	0,073	0,074	0,75	
7.	Jumlah orang/barang yang tersangkut angkutan umum	Orang	195100	195200	195300	195400	195500	195600	
8.	Jumlah orang/barang yang tersangkut angkutan umum	Orang	195.100	195.200	195.300	195.400	195.500	195.600	
		Barang	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	
9.	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/ terminal pertahun	Orang	292.100	292.200	292.300	292.400	292.500	292.600	
		Barang	50.100	50.200	50.300	50.400	50.500	50.600	

BAB VIII
PENUTUP

Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dilakukan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, yang mengacu pada indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, mewadahi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024, perubahan lingkungan strategis, perubahan kebijakan nasional serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial serta bersifat logis, dinamis dan fleksibel agar berdaya guna dan berhasil guna. Target indikator, fokus dan lokus dalam renstra menyesuaikan dengan dinamika perubahan global, nasional dan regional serta ketersediaan anggaran mendasarkan pada kemampuan keuangan daerah;

Adapun kaidah-kaidah penyusunan renstra adalah :

a. Bappeda telah melakukan proses teknokratis untuk menghasilkan rancangan teknokratis RPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya disusun rancangan awal RPD Tanjung Jabung Baraat mengacu kepada RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025 – 2045.
b. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rancangan Awal Renstra PD dengan mempertimbangkan masukan dari Stakeholders terkait dan menyelenggarakan Forum PD untuk mendapatkan masukan penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan Renstra PD;

c. Bappeda melakukan proses finalisasi RPD 2025 – 2029 melalui Forum Musrenbang.

Tindak lanjut dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah dijadikan pedoman dalam

a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
b. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.
d. Monitoring dan evaluasi pasca penyusunan Renstra.

Kuala Tungkal, September 2025
Penanggung Jawab
Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SYAMSUL JUHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199203 1 001